

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas keberhasilan pemerintahan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik (Mahmudi dalam Rahmawati 2018). Sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan menyampaikan laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan segala aktivitas pada suatu periode pelaporan.

Pemerintah dituntut untuk menyampaikan laporan keuangan berkualitas dimana untuk penyusunan laporannya mengacu pada standar yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pelaporan keuangan yang berkualitas akan dapat menghasilkan output berupa informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan (Winwin & Abdulloh, 2017). Laporan keuangan pemerintah harus disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan keuangan yang

berkualitas adalah laporan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Ada delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip perioderitas, prinsip konsisten, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar.

Terkait pelaporan keuangan, meningkatkan kualitas laporan keuangan merupakan salah satu tujuan penting kegiatan pengendalian internal. Berdasarkan Undang-Undang No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal merupakan suatu sistem yang diselenggarakan diseluruh lingkungan pemerintah. Sistem pengendalian internal adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, melindungi aset kekayaan yang dimiliki negara dan sebagai suatu kontrol dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan serta sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pada kenyataannya, masih banyak penyimpangan yang sering dilakukan oleh aparatur pemerintah yang dapat berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan publik dan juga mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

Laporan keuangan adalah laporan yang informasinya sangat berguna bagi pengguna kepentingan dalam pengambilan keputusan. Dalam penyusunan laporan

keuangan, kompetensi sumber daya manusia merupakan hal penting yang perlu diperhatikan, untuk menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam penyusunan laporan harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, agar dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab merupakan suatu kompetensi yang dapat diberikan dengan adanya bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang baik. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik selain harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, suatu organisasi juga harus memiliki sistem informasi akuntansi yang baik untuk memudahkan serta mendukung dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam hal penyusunan laporan keuangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat membantu dalam kegiatan pelaporan laporan keuangan agar laporan tersebut dapat disajikan dan diinformasikan dengan baik. Adanya sistem informasi diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mendorong peningkatan kinerja dari aparatur pemerintah daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Selanjutnya yang dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan adalah komitmen organisasi, dimana komitmen organisasi adalah suatu keyakinan dan dukungan atas tercapainya tujuan yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi dapat diartikan sebagai tingkat kekuatan identifikasi individu, dan keterikatan individu kepada organisasi yang memiliki ketiga karakteristik. Pertama, memiliki kepercayaan yang kuat dan menerima nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Kedua, kemauan yang kuat untuk berusaha atau bekerja keras untuk organisasi. Ketiga, keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi identifikasi dimaksud adalah pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi. Keterikatan dimaksudkan adalah perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan adalah menyenangkan. Suatu Komitmen dapat menjadikan individu menjadi mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi agar organisasinya lebih baik. Di lingkungan pemerintah, pegawai atau aparat yang berkomitmen sangat diperlukan untuk mengoptimalkan dan berupaya agar informasi yang tertuang dalam laporan keuangan yang sesuai dengan aturan sehingga berguna dalam pengambilan keputusan bagi pemangku kepentingan.

Faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi organisasi sektor publik yang kompleks. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam hal ini aplikasi komputer akuntansi pada lingkup pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam membantu pejabat pengelola keuangan dalam menyusun laporan keuangan

yang berbasis akrual dengan efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud adalah penggunaan aplikasi komputer akuntansi pada proses pengelolaan laporan. Pemanfaatan sistem komputerisasi akuntansi dalam pemerintahan akan mempercepat proses pencatatan, penyajian, analisa dan laporan keuangan pemerintah daerah karena aplikasi komputer akuntansi diciptakan untuk mengotorisasi transaksi-transaksi akuntansi ke dalam sebuah laporan dan analisa laporan untuk mendukung pengambilan keputusan sehubungan dengan keadaan keuangan dalam suatu periode akuntansi. Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu faktor untuk mewujudkan laporan keuangan yang memiliki ketepatan waktu dalam penyajiannya serta informasi di dalamnya dapat diandalkan. Dengan kemajuan teknologi informasi yang berkembang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat.

Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau *website*. Sistem informasi yang didukung TI dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didesain menjadi sistem informasi yang efektif. Menurut Jogiyanto (2007) dalam Rahmawati (2018), informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi.

Penilaian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dengan melakukan audit laporan setiap tahun, audit

dilakukan untuk menilai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kualitas pertanggungjawaban yang baik dapat dicerminkan dengan semakin meningkatnya opini audit atas laporan keuangan pemerintah yang diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berarti laporan keuangan yang dilaporkan sudah berdasarkan pada standar yang sudah ditetapkan. Opini badan pemeriksa keuangan dinyatakan dalam empat bentuk opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) termasuk wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas (WTP-DPP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I pada tahun 2018, memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017. Terhadap 542 LKPD tersebut, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%). Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016, kualitas LKPD tahun 2017 mengalami peningkatan 6 poin persen dari 70% pada tahun 2016 menjadi 76% pada tahun 2017. Meskipun secara umum kualitas LKPD mengalami peningkatan, tetapi terdapat 14 dari 542 (3%) LKPD yang mengalami penurunan opini satunya adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Muara Enim yang resmi disahkan tanggal 11 Januari 2013. Sebagai Kabupaten baru, Penukal Abab Lematang Ilir masih

memiliki banyak kekurangan baik dalam aspek perekonomian, teknologi, pembangunan, sumber daya manusia dan aspek lainnya. Hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik salah satunya dalam penyusunan laporan keuangan.

**Tabel 1.1**

**Opini BPK atas LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir**

**Tahun 2014-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Opini Audit</b>
2014	TMP
2015	WDP
2016	WTP
2017	WDP

Sumber : IHPS Tahun 2018 ([www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id))

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa opini Badan Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir belum maksimal. Opini tersebut didapat atas permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Beberapa temuan permasalahan yang berhasil ditemukan yaitu penemuan daftar akun yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atau tidak didukung dengan bukti yang cukup pada LKPD tahun 2017 seperti aset lancar, aset tetap, belanja operasi dan beban operasi-laporan operasional.

Permasalahan yang pernah terjadi pada Sekretariat DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dimana berdasarkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selama Tahun 2017, Bendahara Umum Daerah, melalui Kepala Bidang Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah, telah menerbitkan SP2D Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambah Uang (TU) dan Langsung (LS) pada Sekretariat DPRD, serta telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD. Namun, dari hasil pemeriksaan pada penerimaan surat perintah pencairan dana dan bukti pengeluaran menunjukkan adanya permasalahan yaitu berupa belanja perjalanan dinas ganda merupakan kegiatan yang sama (ganda) baik tujuan dan waktunya. Selain itu Belanja Perjalanan Dinas juga tidak memiliki bukti pendukung SPJ, seperti daftar nominatif, kuitansi pembayaran, daftar rincian biaya, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), bukti transportasi dan penginapan. Hal ini mencerminkan bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban masih terdapat ketidakpatuhan yang terjadi dimana dalam penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai ketentuan serta masih adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur pemerintah yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat berdampak terhadap laporan keuangan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PALI”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliti menguji apakah terdapat pengaruh antara faktor faktor tersebut terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.

Berdasarkan uraian diatas maka penliti ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?
2. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?
4. Apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?
6. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali?

### **1.3 Ruang Lingkup Permasalahan**

Agar pembahasan ini tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, maka dalam penulisan penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada faktor- faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten pali.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah berikut ini:

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Pali.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan teori, pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan manfaat berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

1. Untuk Pemerintah

Diharapkan hasil penelitian bisa dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam upaya meningkatkan kualitas dari laporan keuangan yang dihasilkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutny.